

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kegiatan impor menjadi elemen penting dari rantai pasokan. Menurut Ifat (2018) impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Dalam konteks ini, pengurusan dokumen impor menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses pengiriman barang dari luar negeri. Sedangkan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, impor dapat didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Di Indonesia, banyak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Salah satu layanan yang sering digunakan adalah jasa dari Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK berfungsi sebagai perantara bagi perusahaan yang ingin mengimpor barang, dengan tanggung jawab utama dalam mengurus dokumen serta muatan yang masuk ke wilayah pabean. Umumnya, importir memanfaatkan jasa PPJK untuk memperlancar proses masuknya barang ke dalam negeri. PPJK menyediakan layanan menyeluruh yang mencakup pemenuhan dokumen impor, penyelesaian biaya terkait penanganan muatan, hingga pengurusan dokumen agar barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean (Rahmawati & Westi, 2016).

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan memiliki peran yang krusial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. Keberadaan perusahaan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku ekspor dan impor dalam pengelolaan jasa pengiriman barang lintas negara, sehingga memperlancar proses distribusi dan administrasi perdagangan internasional.

PPJK bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen impor, termasuk aspek perizinan dan perpajakan (Rahmawati & Westi, 2016). Keberadaan PPJK membantu mempercepat dan menyederhanakan proses impor bagi perusahaan importir. Berdasarkan regulasi dari Kementerian Perhubungan, layanan ini tidak hanya terbatas pada pengurusan dokumen, tetapi juga mencakup penyediaan solusi logistik terpadu, termasuk ketersediaan armada transportasi dan layanan distribusi barang dari maupun ke pelabuhan dan gudang.

Agar pengawasan terhadap keluar masuknya barang impor dan ekspor di pelabuhan berjalan lancar, dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Barang yang keluar atau masuk pelabuhan wajib dilengkapi dokumen resmi. Bea dan Cukai bersama instansi pelabuhan bekerja sama untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus barang, sekaligus mencegah penyelundupan yang bisa merugikan negara. Untuk itu, dibutuhkan pengawasan yang efektif terhadap petugas Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya. (Silano dkk., 2023)

Dokumen dalam proses impor memegang peran krusial karena keakuratan isinya sangat menentukan kelancaran arus perdagangan dari luar negeri ke Indonesia. Umumnya, dokumen-dokumen tersebut disusun menggunakan format standar internasional dan ditulis dalam Bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan global (Kwartama, 2024).

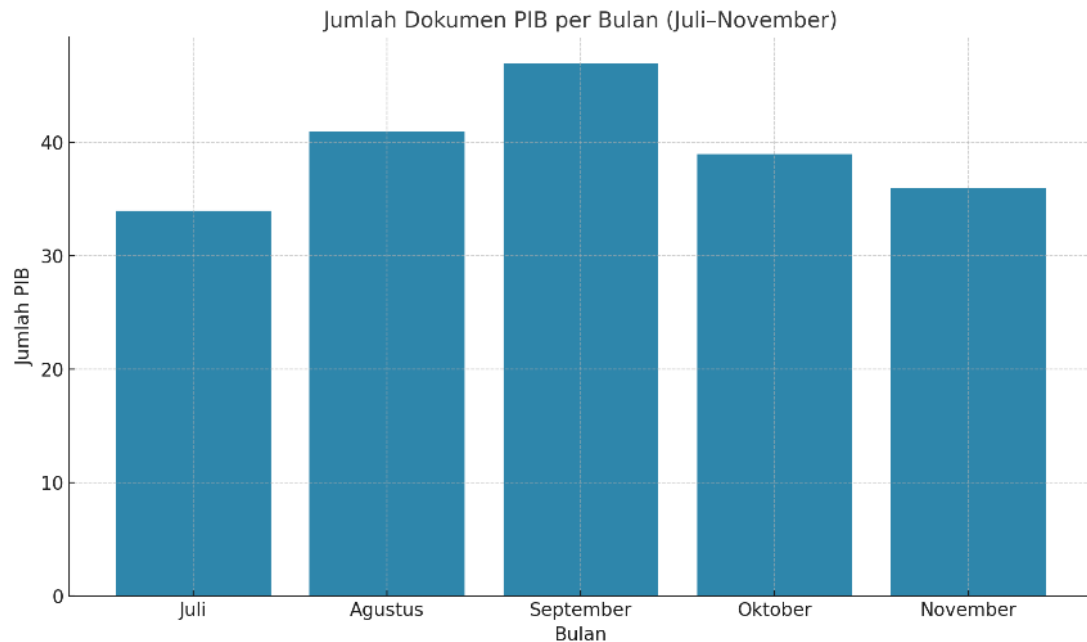
Pengurusan dokumen impor mencakup berbagai jenis dokumen, seperti *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, dan dokumen bea cukai. Setiap dokumen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa barang yang diimpor dapat melewati proses pemeriksaan dan pengeluaran dengan lancar. Kesalahan dalam penginputan data atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam dokumen dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pengeluaran barang. Hal ini tidak hanya mengganggu rantai pasokan tetapi juga dapat menimbulkan biaya tambahan seperti *demurrage*.

Permasalahan yang sering timbul dalam pengurusan dokumen impor adalah ketidaksesuaian antara barang yang diperiksa oleh Bea Cukai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen impor, seperti *Bill of Lading*, *Invoice*, dan *Packing List*. Ketidaksesuaian ini dapat berupa perbedaan dalam jumlah barang, spesifikasi, klasifikasi *HS Code*, atau nilai barang, yang seluruhnya berdampak pada proses clearance. Ketidaktepatan data tersebut tidak hanya menghambat kelancaran proses pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai, tetapi juga berpotensi menyebabkan penahanan barang, pemeriksaan fisik mendalam, bahkan pengenaan sanksi administratif atau koreksi pajak. Dalam praktiknya, masalah ini sering terjadi akibat kelalaian atau kurangnya ketelitian saat proses input data oleh perusahaan *freight forwarder* atau

PPJK, terutama saat menangani volume dokumen yang besar dalam waktu terbatas. Akibatnya, proses pengeluaran barang menjadi tertunda dan menimbulkan biaya tambahan seperti *demurrage* yang dapat membebani importir secara finansial.

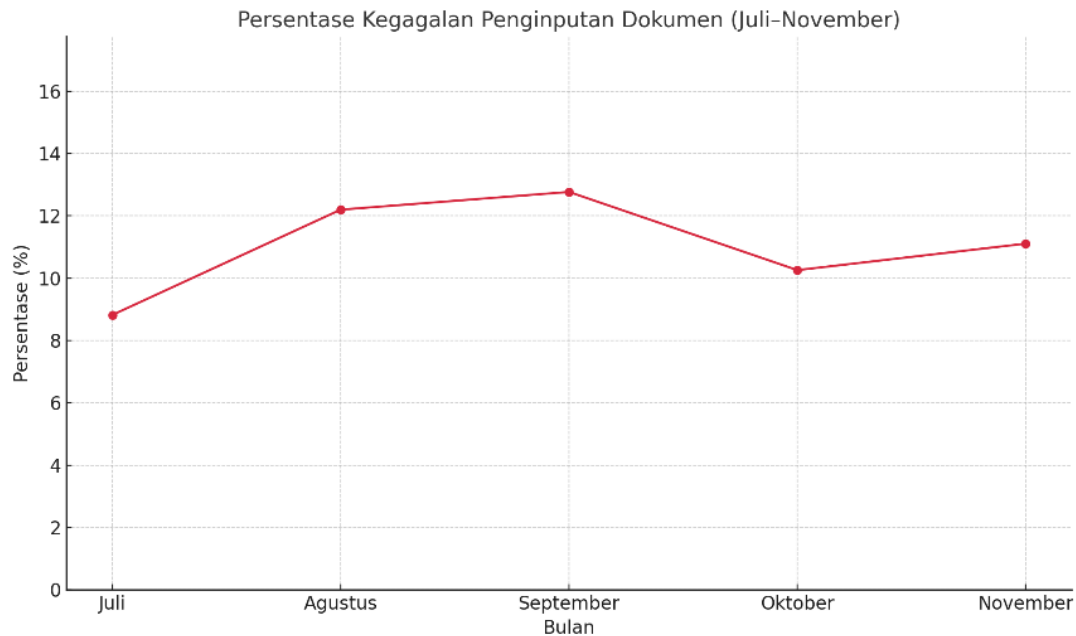
Kesalahan penginputan data adalah salah satu masalah umum yang sering dihadapi oleh perusahaan PPJK. Beberapa contoh kesalahan yang dapat terjadi meliputi informasi produk yang tidak akurat, data kuantitas dan harga yang tidak sesuai. Setiap keterlambatan yang terjadi akibat kesalahan ini berpotensi mengakibatkan biaya *demurrage*. Menurut Dewi (2020), *demurrage* merupakan biaya atau denda yang dikenakan akibat kapal bersandar melebihi waktu yang telah ditentukan untuk kegiatan muat dan bongkar barang, di mana waktu tersebut ditetapkan berdasarkan kecepatan operasional proses tersebut. Jika terjadi keterlambatan, biaya ini dapat menjadi besar dan berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan.

PT. XYZ, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dokumen-dokumen penting yang terkait dalam kegiatan impor. PT. XYZ menghadapi tantangan besar dalam memastikan akurasi data pada setiap dokumen impor. Dengan volume pengiriman yang tinggi dan beragam jenis barang yang diimpor, risiko kesalahan penginputan data semakin meningkat.



Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Impor Tahun 2024

Berdasarkan data penerimaan impor, terlihat bahwa PT. XYZ sebagai perusahaan PPJK menangani cukup banyak dokumen impor setiap bulannya. Dengan jumlah dokumen yang tinggi dan jenis barang yang beragam, risiko terjadinya kesalahan input data menjadi sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa PT. XYZ menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketelitian dan akurasi dokumen agar proses impor tidak terhambat dan biaya tambahan seperti *demurrage* bisa dihindari. Selain itu, tekanan untuk memenuhi tenggat waktu juga sering kali membuat staf terburu-buru dalam memproses dokumen, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Di samping itu, gangguan pada sistem Bea Cukai juga menjadi permasalahan tersendiri karena dapat menyebabkan tertundanya pengajuan dokumen impor, yang berdampak pada keterlambatan proses *clearance* barang.



Gambar 1. 2 Grafik Persentase Kegagalan Tahun 2024

Dari grafik persentase kegagalan yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa semakin banyak dokumen impor yang ditangani PT. XYZ, semakin besar pula risiko kesalahan input data. Kesalahan ini meliputi ketidaksesuaian *HS Code*, jumlah atau nilai barang, dokumen seperti *packing list* atau *invoice* tidak lengkap, sistem CEISA error dan tenggat waktu yang singkat. Akibatnya, proses pengeluaran barang bisa tertunda dan perusahaan bisa dikenakan biaya tambahan seperti *demurrage*. Hal ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan sistem kerja yang lebih baik agar kesalahan dapat dikurangi dan proses impor berjalan lancar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan PPJK, khususnya PT. XYZ dalam pengurusan dokumen impor. Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pengurusan dokumen impor dengan mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses tersebut dan menganalisis peran masing-masing pihak

dalam memastikan akurasi data. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak kesalahan proses *input* data dengan menilai jenis-jenis kesalahan yang sering terjadi dan dampaknya terhadap kelancaran proses pengeluaran barang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

- 1) Apa peran perusahaan PPJK dalam mendukung kelancaran pengurusan dokumen impor pada PT. XYZ?
- 2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT. XYZ dalam pengurusan dokumen impor?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis peran perusahaan PPJK dalam pengurusan dokumen impor pada PT. XYZ.
- 2) Menganalisis factor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh XYZ dalam pengurusan dokumen impor.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait kelemahan dalam proses pengurusan dokumen impor yang dilakukan oleh PT. XYZ. Selain itu, penelitian ini akan membantu perusahaan dalam merancang strategi untuk

meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko keterlambatan, serta meminimalkan biaya *demurrage*.

2) Bagi Program Studi

Diharapkan dapat menambah referensi akademis terkait peran PPJK dalam perdagangan internasional, sehingga dapat memperkaya literatur yang tersedia. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi mahasiswa mengenai proses pengurusan dokumen impor dan berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan peneliti pemahaman mendalam tentang praktik dan tantangan yang dihadapi perusahaan PPJK dalam pengurusan dokumen impor, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang dialami PT. XYZ. Secara keseluruhan, penelitian ini memperluas wawasan peneliti di bidang logistik dan manajemen rantai pasok, serta mengasah kemampuan analisis terhadap permasalahan operasional di lapangan.